

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty Pada Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI

Desty Eka Putri¹, Jusmani², Oktariansyah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, estyeka1712@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of financial performance of companies in the infrastructure sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) before and after the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The second phase of the tax amnesty policy, implemented in 2022, is expected to improve tax compliance, strengthen the national revenue base, and stimulate economic growth, particularly in the infrastructure sector as a strategic pillar of development. This research adopts a quantitative method with a comparative approach. The data used are secondary data obtained from the companies' annual financial reports for three years before (2019–2021) and three years after (2022–2024) the implementation of the tax amnesty. Financial performance is measured using financial ratios such as Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), and Total Asset Turnover (TATO). Data analysis was conducted using the Normality Test and the Wilcoxon Signed Rank Test. The results show that there are significant differences in several financial performance indicators before and after the implementation of the tax amnesty policy, indicating the policy's impact on the financial health of infrastructure companies listed on the IDX. These findings provide implications for the government and market participants regarding the effectiveness of fiscal policy on the real sector.

Keywords: Tax Amnesty, Financial Performance, Return on Assets, Debt to Equity, Current Ratio, Total Asset Turnover.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Kebijakan *tax amnesty* jilid II yang diberlakukan pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat basis penerimaan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sektor infrastruktur sebagai salah satu sektor strategis pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode tiga tahun sebelum (2019–2021) dan tiga tahun sesudah (2022–2024) pelaksanaan *tax amnesty*. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio-rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Debt to Equity (DER) Current Ratio (CR) dan Total Asset TurnOver (TATO). Analisis data dilakukan dengan Uji Normalitas, Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada beberapa indikator kinerja keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty*, yang mengindikasikan adanya pengaruh kebijakan tersebut terhadap kesehatan keuangan perusahaan infrastruktur di BEI. Temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan pelaku pasar terkait efektivitas kebijakan fiskal terhadap sektor riil.

Kata kunci: : Tax Amnesty, Kinerja Keuangan, ROA, Debt to Equity, Current Ratio, Total Assets TurnOver.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah adalah perpajakan., pajak memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan nasional. Namun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami



perlambatan pada periode 2013 hingga 2015, yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak negara. Hal ini mengakibatkan sejumlah permasalahan ekonomi seperti menurunnya likuiditas perbankan, cadangan devisa, serta meningkatnya defisit anggaran. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati (2016), menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia yang berada di bawah 11% menunjukkan lemahnya kapasitas sistem perpajakan nasional. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah meluncurkan program Tax Amnesty pada tahun 2016 sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, serta merepatriasi aset luar negeri.

Selama amnesti pajak, pembayar pajak dapat melaporkan aset yang sebelumnya belum mereka ungkapkan dengan tarif tebusan ringan dan tanpa dikenakan sanksi. Kebijakan ini diterapkan dalam dua gelombang, yaitu pada 2016–2017 dan kembali pada 2022. Sektor infrastruktur, yang menjadi motor utama pembangunan nasional, menjadi salah satu sektor yang terdampak kebijakan ini. Repatriasi dana dari luar negeri diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, sejauh mana wajib pajak mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka pada awal pelaksanaan Tax Amnesty masih tergolong rendah, hanya 60,75% pada tahun 2016, meskipun terus meningkat hingga 88% pada tahun 2023 (DJP, 2023).

Namun, efektivitas Tax Amnesty terhadap kinerja keuangan perusahaan masih menjadi perdebatan. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam; Ikhsan & Herawati (2022) menemukan pengaruh terbatas pada rasio keuangan perusahaan manufaktur, sedangkan Ariani et al. (2018) menemukan dampak signifikan pada perusahaan tekstil dan garmen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan Tax Amnesty dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sektor usaha.

Dalam konteks ini, Tax Amnesty diposisikan tidak hanya sebagai batas waktu observasi, tetapi juga sebagai intervensi kebijakan fiskal yang diasumsikan mampu memengaruhi perilaku dan kinerja keuangan perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki posisi keuangan perusahaan melalui pengurangan beban pajak dan peningkatan transparansi, serta menjadi sinyal positif bagi investor, hal ini merupakan pertanda baik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan Amnesti Pajak, dengan penekanan pada kriteria likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.

B. KAJIAN TEORI

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Spence (1978) pertama kali memperkenalkan hipotesis pensinyalan dalam makalahnya "*Job Market Signaling*". Menurut Spence (1978), sinyal memancarkan sinyal. Pemilik informasi, pengirim, berupaya memberikan informasi yang bermanfaat kepada penerima. Berdasarkan interpretasi mereka terhadap sinyal tersebut, penerima selanjutnya akan mengubah perilaku mereka. Oleh karena itu, teori sinyal menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana respons pasar atau pihak luar terhadap perubahan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan.

Tax Amnesty

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1, Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dikenal sebagai amnesti pajak. Dengan

mengungkapkan aset dan membayar tebusan, mereka menghindari hukuman pidana di sektor pajak serta sanksi administrasi perpajakan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan, menurut pendapat Hery (2016:13), merupakan upaya resmi untuk menunjukkan seberapa baik suatu bisnis menghasilkan laba dan mempertahankan posisi kas tertentu. Dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan saat ini, pengukuran kinerja keuangan dapat menunjukkan potensi perusahaan untuk pertumbuhan dan perkembangan finansial..

Kinerja keuangan, menurut pendapat Fahmi (2020:142), adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar keuangan. Penerapan peraturan yang berlaku secara tepat dan benar menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka pendek, menurut Kasmir (2019:110). Menurut Kasmir (2019:134), rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis rasio berikut:

- a. Current Ratio
- b. Quick Ratio
- c. Cash Ratio

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas, menurut Kasmir (2019:114), adalah metrik yang menilai kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Kesehatan keuangan perusahaan selama satu periode waktu atau lebih dapat diukur dan dikuantifikasi menggunakan berbagai rasio profitabilitas:

1. Profit margin (profit margin on sales)
2. Return on investment (ROI)
3. Return on equity (ROE)
4. Laba per lembar saham
5. Return on asset (ROA)

Rasio Aktivitas

Efektivitas operasi perusahaan saat ini dievaluasi menggunakan rasio aktivitas, menurut pendapat Kasmir (2019:174). Kasmir menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis rasio aktivitas, antara lain:

1. Perputaran piutang usaha
2. Rata-rata jumlah hari piutang usaha tertagih
3. Perputaran persediaan
4. Rata-rata hari pengumpulan persediaan
5. Perputaran modal kerja
6. Perputaran aset tetap
7. Perputaran aset

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas, menurut Darmawan (2020:73), merupakan metrik Digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam membayar utangnya jika terjadi likuidasi. Kasmir (2019:155) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam rasio solvabilitas, seperti:

1. Rasio utang terhadap aset (debt ratio)
2. Rasio utang terhadap ekuitas



3. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas
4. Cakupan utang aset berwujud
5. Rasio kewajiban lancar terhadap kekayaan bersih
6. Persentase bunga yang diperoleh
7. Cakupan biaya tetap

Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio Return on Asset (ROA) sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

H2: Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio Debt to Equity (DER) sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

H3: Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio Current ratio (CR) sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

H4: Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio Turn Over Asset (TATO) sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty.

C. METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan pada seluruh perusahaan di sektor infrastruktur dengan laporan keuangan komprehensif dari tahun 2019 hingga 2024 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2025 menjadi subjek penelitian ini. Informasi perusahaan bersumber dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI-BEI), yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Lrg. Gotong Royong, 9/10 Ulu Palembang, dan merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.

Metode Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan filsafat positivisme. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis melalui pemrosesan dan analisis statistik data numerik.. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis dengan teknik statistik untuk melihat adanya pengaruh sebelum dan sesudah intervensi kebijakan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, dan kriteria yang digunakan terbatas pada perusahaan yang secara rutin merilis laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan.

Teknik Analisis Data

Uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji perbandingan dua sampel berpasangan menggunakan Uji Wilcoxon Signed rank termasuk di antara metode analisis data yang digunakan, tergantung pada distribusi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk setiap variabel digunakan dalam statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum data. Nilai rata-rata (mean) merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk

menunjukkan pusat distribusi suatu data. Sementara itu, standar deviasi menggambarkan tingkat variasi atau seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA_SEBELUM	39	-127,73	13,52	,6274	21,56483
DER_SEBELUM	39	8,86	514,78	130,9292	135,45051
CR_SEBELUM	39	7,11	1173,71	224,5595	282,61636
TATO_SEBELUM	39	7,26	127,44	27,9772	24,01373
ROA_SESUDAH	39	-41,88	14,69	,3210	10,70236
DER_SESUDAH	39	-1467,08	530,98	80,5626	281,86989
CR_SESUDAH	39	18,22	2348,60	250,0292	471,16921
TATO_SESUDAH	39	,73	66,25	22,5710	17,88027
Valid N (listwise)	39				

Sumber: diolah 2025

Dari tabel diatas, Dapat dipahami mengapa nilai Return on Assets (ROA) minimum meningkat setelah skema amnesti pajak, yaitu dari -127,73 menjadi -41,88. Nilai maksimum juga meningkat dari 13,52 menjadi 14,69. Namun, nilai rata-rata ROA mengalami penurunan dari 0,6274 menjadi 0,3210, menunjukkan adanya penurunan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Standar deviasi juga menurun dari 21,56483 menjadi 10,70236, menandakan variasi nilai ROA antarperiode sesudah tax amnesty lebih kecil.

Uji statistik Debt to Equity (DER), nilai minimum mengalami penurunan signifikan dari 8,86 menjadi -1467,08, sedangkan nilai maksimum meningkat dari 514,78 menjadi 530,98. Rata-rata DER justru mengalami penurunan dari 130,9292 menjadi 80,5626, yang menunjukkan adanya perbaikan struktur permodalan perusahaan. Namun, standar deviasi meningkat drastis dari 135,45051 menjadi 281,86989, menunjukkan bahwa fluktuasi DER antarperiode sesudah tax amnesty semakin tinggi.

Uji Current Ratio (CR), mengalami kenaikan dari 7,11 menjadi 18,22, sedangkan nilai maksimum juga meningkat tajam dari 1173,71 menjadi 2348,60. Rata-rata CR naik dari 224,5595 menjadi 250,0292, menunjukkan perbaikan likuiditas jangka pendek perusahaan. Namun, standar deviasi juga meningkat dari 282,61636 menjadi 471,16921, yang mengindikasikan peningkatan variasi antarperiode setelah kebijakan tax amnesty.

Uji Total Asset TurnOver (TATO) mengalami penurunan dari 7,26 menjadi 0,73, sedangkan nilai maksimum menurun dari 127,44 menjadi 66,25. Rata-rata juga menurun dari 27,9772 menjadi 22,5710, Hal ini menunjukkan penurunan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, deviasi standar TATO juga menurun dari 24,01373 menjadi 17,88027, yang mengindikasikan penurunan penyebaran nilai data antarperiode.

Hasil Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah data penelitian terdistribusi normal, dilakukan uji



normalitas. Metode Shapiro-Wilk digunakan untuk melakukan uji normalitas karena jumlah sampel dalam penelitian ini lebih sedikit dan kurang dari 50, sehingga lebih tepat dan sensitif dibandingkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel kecil hingga menengah. Hasil dari uji normalitas ini akan menjadi dasar dalam pemilihan metode uji hipotesis. Uji Paired sample T-test digunakan untuk mengevaluasi hipotesis jika data terdistribusi secara normal. Di sisi lain, teknik non-parametrik digunakan untuk menguji hipotesis ketika data tidak terdistribusi secara teratur, yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ROA_SEBELUM	.375	39	.000	.320	39	.000
DER_SEBELUM	.184	39	.002	.824	39	.000
CR_SEBELUM	.296	39	.000	.698	39	.000
TATO_SEBELUM	.228	39	.000	.726	39	.000
ROA_SESUDAH	.311	39	.000	.691	39	.000
DER_SESUDAH	.362	39	.000	.514	39	.000
CR_SESUDAH	.367	39	.000	.509	39	.000
TATO_SESUDAH	.323	39	.000	.784	39	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil pengujian Shapiro-Wilk sebagaimana Nilai signifikan untuk setiap variabel ditunjukkan dalam tabel., baik sebelum maupun sesudah kebijakan tax amnesty, yang semuanya memiliki nilai signifikansi (Sig.) < 0,05. Artinya, semua data tidak terdistribusi normal.

Karena setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat dikatakan tidak ada data yang terdistribusi secara teratur. Oleh karena itu, asumsi dalam penelitian ini diuji menggunakan uji non-parametrik yang disebut uji peringkat bertanda Wilcoxon.

Hasil Wilcoxon Signed Rank Test

Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test Variabel ROA sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

ROA SESUDAH - ROA SEBELUM	
Z	-2.017 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.044

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Nilai Z yang dihitung adalah -2,017 dengan nilai signifikansi 0,044, berdasarkan hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks mengenai perbedaan Return on Assets (ROA) sebelum dan sesudah program amnesti pajak. Diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak berbeda secara signifikan. Hipotesis penelitian yang menyatakan adanya perbedaan antara ROA perusahaan sebelum dan sesudah program amnesti pajak didukung oleh temuan ini.

Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test Variabel DER sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

Test Statistics ^a	
DER_SESUDAH - DER_SEBELUM	
Z	-.098 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.922

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Dengan nilai signifikansi 0,922, nilai Z hitung untuk uji yang membandingkan Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) sebelum dan sesudah program amnesti pajak adalah -0,098. Karena nilai signifikansi ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05, dapat dikatakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.

Hasilnya, DER perusahaan sebelum dan sesudah program amnesti pajak tidak banyak berubah. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) sama sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak..

Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test Variabel CR sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

Test Statistics ^a	
CR_SESUDAH - CR_SEBELUM	
Z	-.447 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.655

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Z yang ditentukan untuk selisih Rasio Lancar (CR) sebelum dan sesudah program amnesti pajak adalah -0,447, dengan nilai signifikansi 0,655. Karena nilai signifikansi ini lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05, maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Rasio Lancar (CR) perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak tidak berubah secara signifikan. Hasil ini mendukung asumsi bahwa tidak ada perbedaan CR sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak.

Hasil Uji Wilcoxon Sign Rank Test Variabel CR sebelum dan sesudah kebijakan Tax Amnesty

Test Statistics ^a	
TATO_SESUDAH - TATO_SEBELUM	
Z	-1.472 ^b



Asymp. Sig. (2-tailed)

.141

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Nilai Z yang dihitung adalah -1,472 dengan nilai signifikansi 0,141 berdasarkan hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks terhadap perbedaan Total Asset Turnover (TATO) sebelum dan sesudah program amnesti pajak. Diputuskan bahwa H_0 diterima sementara H_a ditolak karena nilai signifikansi ini lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TATO bisnis sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak tidak jauh berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap seberapa baik bisnis di sektor infrastruktur menghasilkan penjualan melalui penggunaan seluruh aset yang tersedia.

Pembahasan

Perbandingan Return on Assets (ROA) sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai Return on Assets (ROA) antara sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty. Nilai rata-rata ROA sebelum kebijakan adalah sebesar 0,6274, sedangkan setelah kebijakan menurun menjadi 0,3210, dengan selisih penurunan sebesar 0,3064. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan mengalami penurunan setelah kebijakan tax amnesty diberlakukan.

Dari segi penyebaran data, standar deviasi ROA sebelum kebijakan sebesar 21,56483, sedangkan setelah kebijakan menjadi 10,70236. Artinya, meskipun rata-rata menurun, variasi data menjadi lebih sempit, yang mengindikasikan stabilitas profitabilitas sedikit meningkat setelah kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test, diperoleh nilai Z hitung -2,017 sedangkan Z tabel pada taraf signifikansi 5% (dua arah) adalah $\pm 1,96$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,044. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Kasmir (2018:201), yang menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa aset perusahaan digunakan secara efisien untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, penurunan ROA dapat menjadi indikasi adanya ketidakefisienan atau tekanan kinerja setelah kebijakan diterapkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arlina Suryaningsih (2018) bahwa tidak terdapat perbedaan return on asset sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty. Selain itu, penelitian Zahrah dan Utiyati (2018) yang meskipun berfokus pada peristiwa merger, juga mendapati adanya perubahan signifikan pada ROA, sehingga mendukung bahwa kebijakan besar seperti tax amnesty atau merger dapat memengaruhi kinerja profitabilitas perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tax

amnesty, khususnya pada tingkat profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Nilai ROA mengalami penurunan setelah kebijakan tax amnesty, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset menurun.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan laba bersih dan total aset setelah kebijakan, namun persentase penurunan laba bersih lebih besar dibandingkan penurunan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan aset-asetnya secara optimal, sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal pasca kebijakan.

Perbandingan Debt to Equity (DER) sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nilai Debt to Equity Ratio (DER) antara sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty. Nilai rata-rata DER sebelum kebijakan adalah sebesar 130,9292, sedangkan setelah kebijakan menurun menjadi 82,6732, dengan selisih penurunan sebesar 48,256. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan mengalami perubahan, dengan kecenderungan perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang setelah kebijakan diberlakukan.

Dari segi penyebaran data, standar deviasi DER sebelum kebijakan sebesar 135,45051, sedangkan setelah kebijakan meningkat menjadi 285,34109. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata DER menurun, variasi antar perusahaan meningkat secara signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang lebih besar antar perusahaan dalam pengelolaan struktur modalnya setelah kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test, diperoleh nilai Z hitung sebesar -.341 sedangkan Z tabel pada taraf signifikansi 5% (dua arah) adalah $\pm 1,96$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,773. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara DER sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Hasil ini sejalan dengan teori menurut Kasmir (2019: 157) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Ikhsan dan Herawati (2022), Arlina dan Suryaningsih (2018), serta Nur Laila Safitri dan Lilis Ardini, yang juga menyimpulkan bahwa rasio DER tidak menunjukkan perbedaan signifikan setelah kebijakan tax amnesty. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Della Aprilia (2020) dan Anding Nugraha dkk. (2020), yang mencatat bahwa rasio DER tetap stabil atau tidak berubah signifikan setelah tax amnesty. Kemungkinan penyebabnya adalah karena keputusan struktur modal perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi manajemen keuangan dan kondisi sektor industri, bukan hanya kebijakan fiskal semata.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Joko Priyono (2019), yang menemukan bahwa DER mengalami perubahan signifikan setelah tax amnesty. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi karakteristik sektor industri, ukuran perusahaan, serta periode observasi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata perusahaan menurunkan tingkat utangnya setelah kebijakan, perubahan tersebut



tidak cukup konsisten atau merata untuk dianggap signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kebijakan keuangan masing-masing perusahaan dalam merespon tax amnesty.

Perbandingan Current Ratio (CR) sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Berdasarkan data, nilai Current Ratio (CR) menunjukkan adanya peningkatan setelah kebijakan tax amnesty. Rata-rata CR sebelum kebijakan adalah sebesar 224,5595, dan meningkat menjadi 250,0292 setelah kebijakan, dengan selisih kenaikan sebesar 25,4697. Peningkatan ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sedikit membaik pasca kebijakan, yaitu perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki.

Namun demikian, penyebaran data menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dengan standar deviasi CR sebelum kebijakan sebesar 282,61636, sedangkan setelah kebijakan meningkat menjadi 471,16921. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi kenaikan rata-rata, terdapat variasi yang sangat besar antar perusahaan, menunjukkan ketidakteraturan dalam peningkatan likuiditas.

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan nilai Z hitung sebesar -.447 sedangkan Z tabel pada taraf signifikansi 5% (dua arah) adalah $\pm 1,96$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,655. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CR sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori menurut Hery (2018:152) rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Ikhsan dan Herawati (2022) serta Arlina dan Suryaningsih (2018), yang juga menyimpulkan bahwa CR tidak mengalami perubahan signifikan pasca kebijakan tax amnesty. Hal ini menunjukkan bahwa tax amnesty belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan likuiditas secara menyeluruh, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Della Aprilia (2020) yang menemukan adanya perbedaan signifikan pada rasio CR setelah kebijakan tax amnesty pada perusahaan sektor properti dan real estate. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik sektor industri yang berbeda, di mana sektor properti mungkin lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal dibandingkan dengan sektor infrastruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan CR setelah kebijakan tidak menunjukkan hasil yang konsisten dan signifikan secara statistik. Peningkatan ini kemungkinan besar hanya terjadi pada beberapa perusahaan tertentu, bukan merupakan tren umum.

Perbandingan Total Asset Turnover (TATO) sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Rata-rata Total Asset Turnover (TATO) sebelum kebijakan tax amnesty adalah sebesar 27,977, sedangkan setelah kebijakan menurun menjadi 22,5710, dengan selisih penurunan sebesar 5,4062. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi

perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan menurun setelah kebijakan diberlakukan.

Dari sisi penyebaran, standar deviasi TATO sebelum kebijakan sebesar 24,01373, dan setelah kebijakan menurun menjadi 17,88027. Ini menunjukkan bahwa variasi antar perusahaan dalam memanfaatkan asetnya menjadi lebih kecil, yang mengindikasikan adanya konsistensi penurunan efisiensi aset setelah kebijakan.

Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Ranks Test, diperoleh nilai Z hitung sebesar -1,472 sedangkan Z tabel pada taraf signifikansi 5% (dua arah) adalah $\pm 1,96$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,141. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara TATO sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty.

Hasil ini sejalan dengan teori menurut Rosyamsi (2019:31) Total assets turnover menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Artinya bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dalam menghasilkan laba yang menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Muhammad Ikhsan dan Herawati (2022) serta Della Aprilia (2020), yang menemukan adanya perbedaan signifikan pada rasio TATO setelah kebijakan tax amnesty, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset pada perusahaan yang mereka teliti mengalami perubahan berarti pasca kebijakan.

Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nila Gemala et al. (2020) dan Joko Priyono (2019), yang juga menyimpulkan bahwa rasio aktivitas seperti TATO tidak mengalami perubahan signifikan setelah penerapan tax amnesty. Perbedaan hasil antar penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan sektor industri yang diteliti, periode pengamatan yang digunakan, atau kondisi internal perusahaan seperti struktur aset dan operasional yang berbeda-beda.

Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio TATO. Hasil ini mengindikasikan bahwa tax amnesty berdampak terhadap efisiensi penggunaan aset perusahaan, namun dampaknya cenderung negatif, ditandai dengan penurunan tingkat perputaran aset. Penurunan ini dapat terjadi karena turunnya pendapatan atau karena perusahaan tidak lagi memanfaatkan asetnya secara optimal pasca kebijakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang meneliti tentang perubahan rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah program amnesti pajak, dapat disimpulkan dari keempat ukuran keuangan yang diteliti bahwa:

1. Rasio Return on Assets (ROA) sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak berbeda secara signifikan. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata ROA turun sebesar 0,3064, dari 0,6274 menjadi 0,3210. Nilai Z sebesar -2,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,044 diperoleh dari Uji Wilcoxon Signed Ranks. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada ROA. Dalam kata lain uji hipotesis pertama menunjukan H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Rasio Debt to Equity (DER) tidak berubah secara signifikan sebelum maupun sesudah kebijakan amnesti pajak. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan



- bahwa rata-rata DER turun sebesar 50,3666, dari 130,9292 menjadi 80,5626. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,733 dan nilai Z sebesar -0,341. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada DER. Dengan kata lain, uji hipotesis kedua menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Rasio Lancar (Current ratio) sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak tidak berubah secara signifikan. Berdasarkan temuan analisis statistik deskriptif, rata-rata CR meningkat dari 224,5595 menjadi 250,0292, atau naik sebesar 25,4697. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan nilai Z sebesar -0,447 dengan nilai signifikansi sebesar 0,655. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada CR. Dengan kata lain, uji hipotesis ketiga menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak.
 4. Sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak, rasio Total Asset Turnover (TATO) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata TATO mengalami penurunan dari 27,9772 menjadi 22,5710, atau turun sebesar 5,4062. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan nilai Z sebesar -1,472 dengan nilai signifikansi sebesar 0,141. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada TATO. Dengan kata lain, uji hipotesis keempat menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Meskipun terdapat perubahan yang signifikan pada rasio ROA setelah kebijakan tax amnesty, penurunan nilai ROA menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba bersih secara berkelanjutan dan menstabilkan serta mengoptimalkan penggunaan total aset, sehingga rasio ROA dapat meningkat dan mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik.
2. Meskipun rata-rata DER menurun, tidak terdapat perubahan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tetap menjaga struktur modal yang sehat dan berimbang antara utang dan ekuitas. Pengelolaan utang yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, sekaligus memberikan ruang pertumbuhan yang lebih aman bagi perusahaan.
3. Penurunan TATO mengindikasikan perlunya strategi pemasaran dan operasional yang lebih efektif untuk meningkatkan volume penjualan tanpa harus menambah aset secara berlebihan. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai lebih dari aset yang sudah ada.
4. Diharapkan perusahaan dapat benar-benar memanfaatkan insentif atau keringanan dari kebijakan tax amnesty tidak hanya dari sisi perpajakan, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan restrukturisasi dan efisiensi internal guna meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate di BEI*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arlina, & Suryaningsih. (2018). *Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah tax amnesty pada perusahaan yang terdaftar di BEI*. Jurnal Pajak dan Akuntansi.
- Darmawan. (2020). Dasar-dasar memahami rasio dan laporan keuangan. Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Fahmi I. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Gemala, N., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2022). Analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan antara pra tax amnesty dengan pasca tax amnesty di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.464>
- Hery. (2019). Analisis laporan keuangan. PT Grasindo.
- Ikhsan, M., & Herawati. (2022). Analisis kinerja keuangan sebelum dan setelah tax amnesty (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Kumpulan Executive Summary Mahasiswa Prodi Akuntansi Wisuda Ke-78 Oktober 2022*, 21(1).
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Nugeraha, A., Mandra, I. G., & Putra, I. N. N. A. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Tax Amnesty pada Perusahaan Property dan Real Estate di BEI*.
- Priyono, J. (2019). *Pengaruh tax amnesty terhadap rasio keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI*. Jurnal Ilmiah Akuntansi.
- Spence, M. (1978). Job market signaling. Princeton University Press.
- Sri Mulyani Indrawati. (2016, Agustus 22). Rasio pajak Indonesia masih di bawah 11%. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-pajak-indonesia-masih-di-bawah-11>
- Zahrah, I., & Utiyati, S. (2018). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 7(1), 1–17

